

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya. Otonomi daerah menjadi salah satu dasar timbulnya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sarana untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Mulyana dan Sugiri (2020), dana perimbangan selain digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan

pemerintahannya, juga bertujuan untuk mengurangi adanya ketimpangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerima dana perimbangan yang bersumber dari APBN, dana tersebut dialokasikan kepada daerah untuk mendanai berbagai macam kebutuhan sekaligus melaksanakan tugas seperti tugas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pendanaan pemerintah daerah juga dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan penerimaan pembiayaan.

Adanya hak otonomi daerah membuat pemerintah daerah mendapatkan kebebasan dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran/belanjanya. Belanja pemerintah daerah terbagi atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan belanja pemerintah daerah seringkali mendapat perhatian dari masyarakat luas, oleh karenanya prinsip akuntabilitas dan keterbukaan menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat atas kegiatan pengeluaran maupun pengelolaan keuangan yang dilaksanakannya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun masyarakat. Menurut Mulyana dan Sugiri (2020), tujuan penilaian kinerja tersebut adalah untuk menilai apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, patut, dan bermanfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat maupun pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Penilaian yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun masyarakat terhadap kinerja keuangan suatu daerah akan berbanding lurus dengan pencapaian dan pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah tersebut, karena pada hakikatnya anggaran yang termuat dalam APBD merupakan amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat dan masyarakat kepada pemerintah daerah yang wajib digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Abdul Halim, 2012). Anggaran tersebut harus digunakan oleh pemerintah daerah dengan efektif dan efisien untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang memadai. Komponen laporan keuangan yang dibuat meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK. Komponen laporan keuangan tersebut dapat menjadi perangkat utama dalam melakukan analisis rasio keuangan daerah.

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis laporan keuangan dengan melakukan perbandingan antara akun-akun yang ada pada laporan keuangan, perbandingan antara elemen-elemen laporan keuangan, maupun perbandingan laporan keuangan antar tahun. Analisis rasio keuangan menghasilkan data berupa rasio-rasio yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Abdul Halim (2012), rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kota yang memiliki wilayah yang cukup strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang berbatasan

langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara dan area pegunungan yakni Gunung Slamet di sebelah selatan. Selain itu, Kabupaten Pemalang juga dilalui jalur pantura yang merupakan jalan yang cukup ramai digunakan di Pulau Jawa. Kondisi tersebut memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dengan mengelola sumber daya yang ada secara maksimal. Namun, pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang justru didominasi oleh pendapatan dari transfer. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatannya. Sementara itu, belanja operasi lebih mendominasi kegiatan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dibandingkan kegiatan belanja lainnya.

Mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018-2020, terdapat adanya tren peningkatan realisasi belanja yang dilakukan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan realisasi belanja yang terjadi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 tidak dibarengi dengan peningkatan realisasi pendapatan yang signifikan. Realisasi pendapatan tahun 2020 justru mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 sehingga terjadi defisit anggaran pada tahun 2020. Beberapa informasi di atas membuat penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan menggunakan analisis rasio keuangan semakin menarik untuk dilakukan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muranah (2020) memberikan gambaran terkait rasio keuangan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi pendapatan Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017 masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Namun, kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2013-2017 masih tergolong sangat rendah dan efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam memperoleh pendapatannya masih berada pada kriteria kurang efisien pada tahun 2013-2015 dan kriteria cukup efisien pada tahun 2016 dan 2017. Hasil tersebut dapat menjadi gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2013-2017.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang menggunakan analisis rasio keuangan untuk tahun 2018-2020 dengan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap sumber dana eksternal?
2. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang?

4. Bagaimana tingkat keserasian antara belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang?
5. Bagaimana tingkat pertumbuhan pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap sumber dana eksternal.
2. Mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Mengetahui tingkat keserasian antara belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2018-2020. Penulis befokus pada analisis rasio keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2018-2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun manfaat praktis untuk berbagai pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai rasio keuangan daerah dan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018-2020.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membantu pengguna maupun pembuat laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik karya tulis ini. Landasan teori ini penulis gunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis rasio keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan, gambaran umum objek terkait topik penelitian, dan hasil pembahasan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Hasil pembahasan didasarkan atas landasan teori dan analisis rasio keuangan menggunakan laporan keuangan Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018-2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atas hasil analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2018-2020.